

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, meningkatkan kuantitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing serta mengurangi ketidakmerataan pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antar pemerintah pusat dan daerah (Aryani dan Hari, 2019).

Kemampuan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai kegiatan, hal ini menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut Amandemen Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) bahwa dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Hal ini yang menjadi landasan hukum pelaksanaan desentralisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang membawa perubahan bagi hubungan antar pusat dan daerah (Bawono, 2008).

Untuk mencapai tujuan ekonomi yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi adalah dengan adanya kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan melakukan kebijakan tersebut penganggaran dan realisasi keuangan daerah dapat terlaksana dengan optimal untuk kesejahteraan umum di daerah tersebut. Sistem desentralisasi juga merupakan bentuk upaya demokrasi antara pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat daerah untuk bisa turut bertanggungjawab dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu sistem desentralisasi juga dapat membantu pemerintah daerah untuk mencetuskan berbagai program baru yang tentunya sebagai upaya perbaikan ekonomi sosial di tingkat daerah, dimana semua itu masih dalam rangka untuk membantu mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar dan Siswanto, 2012).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah refleksi dari program pembangunan di daerah sehingga realisasi APBD merefleksikan pula keberhasilan program pembangunan daerah yang telah direncanakan. Realisasi APBD menjadi perhatian khusus pemerintah sehingga Presiden membentuk tim khusus, untuk mengawal realisasi APBN melalui Keputusan Presiden nomor 3 tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau disingkat dengan TEPR (Kamelia, 2017)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 01 menyebutkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD. Lemahnya APBD dapat mengakibatkan target penerimaan tidak tercapai dan banyaknya program atau kegiatan pemerintah yang tidak terlaksana sehingga menimbulkan SILPA.

Simpanan Pemda di perbankan dan SILPA yang relatif tinggi mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan dana APBD oleh Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Suharna (2015) menyebutkan bahwa dari komponen-komponen APBD, yang berpengaruh besar terhadap SILPA berasal dari pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, dana transfer dari pemerintah pusat, serta pendapatan lain yang sah. Hal ini sesuai dengan penelitian Kumorotomo (2010), yang menyatakan bahwa besarnya SILPA menunjukkan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

SILPA juga dapat terjadi disebabkan antara lain realisasi PAD selalu melebihi target dari APBD-P, realisasi Dana Perimbangan fluktuatif utamanya DBH (Dana Bagi Hasil) pada akhir tahun. Pendapatan Daerah yang cenderung melebihi dari yang direncanakan serta adanya tambahan alokasi transfer yang bersifat spesifik dari Pemerintah Pusat atau Provinsi yang tidak direncanakan sebelumnya pada pertengahan tahun anggaran. Realisasi pendapatan yang melampaui target dapat disebabkan karena penganggaran yang ditetapkan cenderung lebih kecil dari potensi riilnya. Hal tersebut yang mengakibatkan adanya SILPA (Ramadhan, 2015)

Sugiantini (2015) mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat yang melakukan transfer secara berkala dan bertahap sesuai dengan jadwal ke daerah disinyalir menjadi penyebab realisasi DAK yang tidak mencapai target, dengan penyaluran dana yang mendekati akhir tahun maka banyak proyek yang sedang dilaksanakan tidak terselesaikan atau bahkan dibatalkan, hal tersebut yang menyebabkan terbentuknya SILPA di daerah.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa sampai saat ini potensi terjadinya SILPA di Pemerintah Daerah masih cukup tinggi yang dapat diartikan belum optimalnya pemanfaatan dana APBN oleh Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah, hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai SILPA.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fahmi (2020) variabel yang digunakan dalam penelitian adalah pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dana alokasi khusus, belanja modal, dan penerimaan pembiayaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti mengganti beberapa variabel yaitu diantaranya adalah variabel pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan penerimaan pembiayaan dengan variabel dana alokasi umum, perkembangan ekonomi, bantuan keuangan. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data LHP BPK dari LKPD Se-Jawa Tahun 2018-2019.

Berdasarkan gagasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) di KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TAHUN 2018-2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap SILPA?
2. Apakah Dana Alokasi Umum terhadap SILPA?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap SILPA?
4. Apakah Perkembangan Ekonomi berpengaruh terhadap SILPA?
5. Apakah Bantuan Keuangan berpengaruh terhadap SILPA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap SILPA.
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap SILPA.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap SILPA.
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Perkembangan Ekonomi terhadap SILPA.
5. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Bantuan Keuangan terhadap SILPA.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi khususnya Akuntansi Pemerintahan terutama pemahaman akan faktor-faktor yang mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan semua masyarakat yang memiliki kepentingan dalam melakukan evaluasi dan pengendalian pembangunan pemerintahan yang bersumber dari APBN, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan. Selain itu penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target pendapatan daerah dalam penyusunan APBD.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu berisi tentang pendahuluan, menjelaskan apa yang menjadi latar belakang masalah dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua berisi tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar dan bahan acuan

dalam melakukan penelitian ini, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab tiga menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan secara operasional. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan mengenai jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab empat ini merupakan inti dari penelitian ini, yang berisi hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab lima ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya.